



Kehadiran Amerika Serikat di Kasus Sudan Selatan pada tahun 2011-2015: Bantuan Kemanusiaan atau Kepentingan Strategis

Muhammad Fajar Febrianto

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S. H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website:<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The problems that occurred in South Sudan in 2011-2015 caused a crisis in South Sudan. the presence of the United States to providing humanitarian assistance in South Sudan has an interest it self. This thesis seeks to reveal the interests of the United States in terms of incorporating strategic interests in South Sudan. The theory of Neorealism, the Concept of National Interest and the Concept of Balance of Power in International Relations are used to explain facts and phenomena and as a basis in building scientific arguments in answering research questions. Built arguments are sourced from sources in the form of reports and other library sources that are processed qualitatively based on existing theories so as to produce explanatory arguments as research answer. Based on data processing using existing theories, the United States in providing assistance to South Sudan is not only limited to providing strategic interests but also related to expanding the influence of the United States in South Sudan. With China in South Sudan providing a security threat to the United States, the United States is also present in order to containment China's influence.

Keywords: *South Sudan, United States, Tiongkok, National Interest, Balance of Power*

PENDAHULUAN

Sebelum Sudan Selatan menyatakan kemerdekaannya pada 9 Juli 2011, wilayah Sudan Selatan ini tidak luput dari konflik berkepanjangan yang terjadi antar saudaranya yaitu Sudan. Konflik yang terjadi disebabkan oleh berbagai kepentingan yang melatar belakungnya dan pada akhirnya menyebabkan perang antar saudara yang sangat lama. Amir H Idris menjelaskan proses pembentukan ras, etnis dan politik identitas di Sudan secara erat dan tidak dapat dipisahkan dengan proses dari sejarah pembentukan negara di wilayah tersebut. Warisan perbudakan yang terjadi selama negara itu belum terbentuk dan kebijakan pemerintah semasa kolonial ikut berkontribusi dalam pembentukan ras dan pembentukan masyarakat terkait budaya mereka menjadi masyarakat politik yang saling bertentangan.

Sifat dari pembentukan negara tidak hanya dibentuk dari struktur sosial politik masyarakat, tetapi juga mengkondisikan bentuk perlawanan dan oposisi terhadap pemerintahan. Proses pembentukan negara selama masa penjajahan telah ikut serta dalam ketidaksetaraan ekonomi dan politik antar berbagai kelompok etnis yang kemudian hal ini berdampak kepada pemerintahan selanjutnya. Dan pada akhirnya hak sosial, politik dan hak untuk mendapatkan perekonomian yang layak menjadi terabaikan dikarenakan adanya ketidaksetaraan yang dijalankan oleh pemerintahan (Amir, 2005, p. 43). Sejalan dengan pernyataan Amir Idris, dengan

mengutip penjelasan Einar Braathen yang menjelaskan “ *we will argue that behind every war conflict in africa which is labelled as tribal or ethnic, there is a complex set of interactive causes*” (Braathen, 2000, p. 5), Terdapat beberapa faktor yang kompleks dalam setiap konflik yang terjadi di Afrika. Konflik yang terjadi di negara-negara Afrika bisa disebabkan oleh etnisitas yang mereka miliki, ataupun ada kepentingan maupun pengalaman masa lampau yang menyebabkan konflik dapat terjadi

Pada tahun 2011 setelah Sudan Selatan menyatakan kemerdekaannya terjadi konflik terkait permasalahan sengketa perbatasan dengan negara Sudan tepatnya di wilayah Abyei (BBC, 2011). Konflik terkait perbatasan ini mengakibatkan hubungan dengan Sudan kembali memanas. Konflik di wilayah Abyei terjadi diantara Suku Dinka yang merupakan etnis pendukung Sudan Selatan dengan etnis arab yang mendukung Sudan. Wilayah Abyei yang menjadi sengketa perbatasan sebenarnya masuk menjadi bagian didalam perjanjian damai (*Comprehensive Peace Agreement*) yang telah disepakati pada tanggal 9 januari 2005 (UN, 2011). Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kedua negara belum mendapat solusi dalam menentukan bagaimana sistem yang akan dipilih untuk menetapkan wilayah Abyei menjadi bagian dari salah satu negara yang memperebutkannya.

Pada tahun 2012 Sudan Selatan juga mengalami konflik dengan negara Sudan terkait permasalahan sumber daya alam yaitu minyak bumi. Sehingga mengakibatkan Sudan Selatan harus menutup produksi minyak buminya selama 1 tahun yang mengakibatkan pengurangan pendapatan ekonomi yang sangat besar (BBC, 2012). Pada tahun 2013 situasi di Sudan Selatan semakin memanas ketika Salva Kiir memecat seluruh kabinet kerjanya dan juga memecat wakil presidennya sendiri yaitu Riek Machar. Kebijakan yang dilakukan Salva Kiir dengan memecat bawahannya mengakibatkan permasalahan di Sudan Selatan semakin bertambah (Aljazeera, 2013). Permasalahan ini ditandai dengan terjadinya konflik diantara suku Dinka dengan suku Nuer di beberapa wilayah di Sudan Selatan. Hasil dari konflik ini mengakibatkan meningkatnya jumlah kemiskinan, kelaparan semakin meluas diberbagai daerah, hancurnya pemukiman penduduk dan infrastruktur negara. Alasan dari pemecatan yang dilakukan presiden Sudan Selatan yaitu didasari oleh motivasi politik Riek Machar yang tertarik untuk menjadi presiden Sudan Selatan pada pemilihan umum berikutnya dan isu skandal korupsi yang dilakukan oleh Salva Kiir.

Perlu diketahui Salva Kiir merupakan wakil presiden Sudan setelah terjadinya perjanjian damai pada tahun 2005 dan juga merupakan pemimpin dari Kelompok Pembebasan Sudan Selatan (*Sudan People's Liberation Army*) (BBC, 2015). Sedangkan Riek Machar menjabat sebagai wakil presiden yang menjalankan pemerintahan di daerah Sudan Selatan semasa perjanjian damai. Dan akhirnya pada tanggal 9 Juli 2011 Sudan Selatan menyatakan kemerdekaannya yang menjadikan Salva Kiir dan Riek Machar menjadi presiden dan wakil presiden yang sah dari negara termuda di dunia yang baru merdeka. Tetapi pada tahun 2013 negara termuda ini mengalami konflik diantara etnis yang mengakibatkan terjadinya krisis keamanan di Sudan Selatan.

Malakal, Bentiu, dan Bor merupakan beberapa wilayah yang tidak luput dari konflik diantara suku Dinka dan suku Nuer terkait keputusan yang dibuat oleh presiden Sudan Selatan. pembantaian Malakal dilakukan oleh suku Nuer terhadap suku Dinka yang menargetkan anak-anak dan perempuan dari etnis Dinka dan juga menghancurkan pemukiman penduduk setempat (BBC, 2015). Konflik ini telah mengakibatkan 1.5 juta penduduk terpaksa meninggalkan wilayahnya, 100ribu jiwa ditempatkan di kamp pengungsian PBB, 400ribu jiwa meninggalkan Sudan Selatan untuk mengungsi di negara tetangga yaitu Ethiopia dan Uganda (HRW, 2014).

Dan sisa dari jumlah penduduk yang menjadi korban konflik ditempatkan di wilayah yang memiliki sedikit suplai makanan dan minuman. Dikarenakan akses yang jauh di beberapa wilayah pengungsian mengakibatkan penduduk di negara Sudan Selatan mengalami kelaparan yang ekstrim.

Konflik yang terjadi di Sudan Selatan juga melibatkan anak-anak didalam menjalankan strategi perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak. *Human Rights Watch* mencatat diperkirakan ada belasan ribu anak berusia dibawah 18 tahun yang berada di Sudan Selatan telah dilatih untuk menjadi tentara yang akan menjadi bagian digaris depan pertempuran (HRW, 2015). Lain hal untuk anak perempuan, mereka dijadikan budak nafsu bagi tentara dari kedua belah pihak. Untuk anak yang berusia dibawah 14 tahun mereka belum ikut berperang tetapi lebih ditempatkan menjadi juru masak untuk mempersiapkan kebutuhan makanan bagi tentara. Tidak jarang anak-anak yang mengalami luka dari peperangan tidak diberikan obat-obatan dan banyak dari mereka yang meninggal di medan pertempuran. Diperkirakan 15ribu-16ribu tentara anak ditempatkan di garis depan untuk melakukan pertempuran yang terjadi diantara suku Dinka dengan suku Nuer (Aljazeera, 2015).

Menurut data dari UNICEF yang dikeluarkan pada tahun 2014 (UNICEF, 2014) diperkirakan terdapat 9 ribu anak di Sudan Selatan telah direkrut dalam menjadi bagian dari angkatan bersenjata dan kelompok dari kedua belah pihak yang berkonflik. Perkiraan ini didasarkan dari banyaknya anak yang mengenakan seragam militer dan membawa senjata dalam aktivitasnya, dan juga banyaknya pelatihan militer yang didalamnya terdapat anak-anak. Dengan kata lain terdapat pelanggaran dan pengabaian dari Sudan Selatan terkait permasalahan anak. Hak yang dimiliki anak untuk hidup bebas dan juga mendapatkan pendidikan terabaikan. Dan juga anak yang ikut dalam peperangan akan memiliki trauma akan masa lalunya yang pernah mereka lihat dan mereka alami.

Selain permasalahan anak di Sudan Selatan juga terdapat permasalahan terkait perempuan. Perempuan di Sudan Selatan banyak menjadi janda khususnya di Upper Nile dikarenakan konflik yang berkepanjangan dan juga perempuan di Sudan Selatan terpinggirkan karena masyarakatnya masih menjalankan praktik atau budaya yang mereka yakini (UNDP, 2012). Terdapat permasalahan gender di Sudan Selatan, seperti halnya terdapat pernikahan dini, kekerasan fisik terhadap perempuan yang merupakan kelompok yang rentan, pemerkosaan yang menyebabkan penyakit menular seksual, kehamilan pada usia dini yang menyebabkan kematian bagi ibu, minimnya fasilitas perawatan dan juga kurangnya pendidikan untuk anak dan juga perempuan, dan juga kurangnya perlindungan hukum dari pemerintah (UNDP, 2012).

PEMBAHASAN

Kepentingan Nasional

USAID memiliki misi yang menjadi garis besar haluan mereka yaitu untuk mengakhiri kemiskinan dan mempromosikan masyarakat yang demokrasi dan mampu menunjukkan potensi mereka. USAID yakin untuk mengakhiri kemiskinan dan permasalahan lainnya dibutuhkan pertumbuhan negara yang berkelanjutan dalam bidang ekonomi, mempromosikan masyarakat yang bebas, damai dan mandiri dengan dijalankan oleh pemerintahan yang efektif dan sah. Dengan adanya hal itu USAID bekerjasama dengan pemerintah negara penerima bantuan untuk membangun sumber daya manusia dan menciptakan jaringan sosial yang dapat menjangkau berbagai permasalahan.

Melalui konsep kepentingan nasional yang berhubungan dengan proses politik kita tentunya sudah mengenal istilah tentang *who gets what, when, and how*, yang dijelaskan oleh

Laswell dan begitu juga di dalam politik internasional konsepnya sama tetapi ruang lingkungannya lebih luas yaitu ranah internasional (Laswell, 1972). Kepentingan nasional adalah tujuan dasar didalam melakukan kebijakan luar negeri, dan merupakan langkah yang mengawali hingga mengakhiri perjuangan suatu negara dalam mencapai tujuannya. Dasar dasar didalam kepentingan nasional terbagi dalam 4 jenis diantaranya adalah ideologi, ekonomi, keamanan dan prestise (Spiegel, *World Politics in A new Era*, p. 236).

Bantuan kemanusiaan yang diberikan USAID kepada Sudan Selatan terjadi pada tahun 2011. USAID memberikan sebesar USD 158 juta dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan di Sudan Selatan (USAID, 2011). Bantuan kemanusiaan yang diberikan terbagi menjadi 10 sektor yaitu dana untuk WASH (*Water, Sanitation, Hygiene*) sebesar USD 21 juta, dana bantuan kemanusiaan untuk kesehatan USD 20,8 juta, kebutuhan logistik sebesar USD 18,3 juta, terkait sektor agrikultur dalam rangka menumbuhkan potensi sumber daya alam yang ada di negara mereka sebesar USD 12,7 juta. USAID juga mementingkan permasalahan kesehatan dalam hal gizi dan nutrisi sebesar USD 3,3 juta. Dalam menangani permasalahan pengungsi, USAID juga memberikan bantuan sebesar USD 2,7 juta untuk tempat pemukiman dan USD 1 juta untuk perlindungan penduduk, terkait permasalahan untuk melancarkan pengkoordinasian bantuan kemanusiaan dan kelancaran informasi bantuan sebesar USD 5,7 juta. USAID juga mengeluarkan dana dalam pendistribusian bantuan makanan sebesar USD 63,9 juta, dan yang juga tidak kalah penting dalam usaha pemulihan ekonomi Sudan Selatan dan agar berjalannya sistem pasar yang mendukung kepentingan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat dari departemen yang membahas masalah pengungsi juga ikut menambahkan bantuan sebesar USD 60 juta kepada Sudan Selatan dan Sudan dalam rangka kegiatan bantuan kemanusiaan untuk sektor menyeluruh yang dianggap penting untuk diselesaikan.

Pada tahun 2012 Pemerintah Amerika Serikat melanjutkan bantuan luar negeri nya ke negara Sudan Selatan untuk merespon kebutuhan bantuan kemanusiaan di negara yang baru merdeka itu. Bantuan kemanusiaan yang diberikan juga semakin meningkat yaitu sebesar USD 275,3 juta. Ini membuktikan bahwa Amerika Serikat mementingkan penyelesaian permasalahan yang ada di Sudan Selatan (USAID, 2012). Sektor-sektor yang Amerika Serikat berikan hampir sama seperti tahun 2011 dalam hal bantuan pangan dan permasalahan WASH di daerah yang dianggap rawan krisis.

Pada tahun 2013 konflik etnis kembali pecah di Sudan Selatan, konflik kali ini terjadi di antara suku Dinka dan suku Nuer yang disebabkan oleh keputusan presiden Sudan Selatan yang memecat wakil presidennya sendiri yang berasal dari etnis Nuer. Di lain sisi pemerintah Amerika Serikat terus melanjutkan bantuan kemanusiaannya kepada Sudan Selatan yang sedang ditimpa konflik saudara, bantuan yang diberikan Amerika Serikat pada tahun 2013 sebesar USD 264,1 juta dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang sedang menimpa Sudan Selatan (USAID, 2013). Kemudian dilanjutkan pada tahun 2014, Amerika Serikat semakin meningkatkan bantuan kemanusiaannya dalam upaya menyelesaikan permasalahan di Sudan Selatan. Pada tahun ini Amerika Serikat menggelontorkan dana sebesar USD 394 juta yang dialokasikan di berbagai sektor yang dianggap penting bagi Amerika Serikat (USAID, 2014). Amerika Serikat pada tahun ini sangat *concern* akan permasalahan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak di Sudan Selatan karena dianggap banyak kasus di Sudan Selatan terjadi terkait konflik etnis yang banyak menimpa Wanita dan anak-anak.

Wanita dijadikan sasaran dari kedua belah pihak yang berkonflik karena dianggap menjadi objek yang paling mudah untuk dilawan dan menjadi salah satu strategi mereka untuk menurunkan mental lawan karena dianggap tidak bisa melindungi wanita dari kedua etnis yang

berseteru. Dari pihak anak-anak dijadikan martir dalam peperangan maupun tenaga tambahan di bagian dapur dan medis. Oleh karena itu USAID/OFDA menggelontorkan dana USD 110 juta dari total bantuan yang tersedia untuk meningkatkan akses mengenai layanan perlindungan seperti dukungan medis dan pemulihan psikologi sosial yang menimpa korban, pengelolaan kasus mengenai *gender-based violence* (GBV), pelatihan, pencegahan dan respon terhadap GBV, dan pembentukan Tim perlindungan yang menangani kasus tersebut karena dianggap penting untuk diselesaikan oleh Amerika Serikat.

Pada tahun 2015 pemerintah Amerika Serikat semakin meningkatkan bantuan kemanusiaannya kepada Sudan Selatan. Amerika Serikat melihat adanya titik terang terkait penyelesaian konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Amerika Serikat optimis akan terjadinya perjanjian damai di antara kedua belah pihak yang berseteru yaitu presiden Salva Kiir dan Riek Machaar yang menjadi pihak oposisi. Oleh sebab keyakinan itu *USAID* menggelontorkan dana sebesar USD 589 juta untuk mendorong dan membantu menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi di Sudan Selatan (USAID, 2015).

Kehadiran Amerika Serikat di Sudan Selatan merupakan manifestasi upaya pencapaian kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini, terlihat bahwa kehadiran Amerika Serikat di Sudan Selatan lebih condong pada upaya untuk mencapai kepentingan-kepentingan nyata bukan hanya terkait kebijakan kemanusiaan. Kepentingan utama Amerika Serikat di Sudan Selatan dalam analisis ini terkait penyebaran kepentingan strategis. Amerika Serikat merupakan negara demokrasi yang menjunjung prinsip dasar negaranya. Oleh karena itu kebijakan luar negeri Amerika Serikat tercermin dari kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negerinya terkait dengan mempromosikan demokrasi, melindungi hak-hak warga negara khususnya hak perempuan dan anak, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, dan juga mempromosikan pengetahuan, pendidikan, dan kesehatan yang dimiliki oleh Amerika Serikat (USDepartmentofState, 2019). bantuan kemanusiaan yang telah dijalankan Amerika Serikat di Sudan Selatan terlihat mengakomodasi kepentingan strategis yang menjadi prinsip atau ideologi Amerika Serikat. oleh karenanya, dapat dikatakan bantuan Amerika Serikat di Sudan Selatan tidak hanya berorientasi kemanusiaan tetapi berorientasi kepentingan yakni penyebaran kepentingan strategis.

Bantuan kemanusiaan yang telah dijalankan Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis pada akhirnya. Seperti adanya istilah yang mengungkapkan bahwa *There's no such thing as a free lunch*. Ungkapan ini menjelaskan bahwa pada hakikatnya tidak ada suatu hal yang gratis semua pasti ada bayarannya. Bahkan jika dihubungkan dengan bantuan luar negeri, bantuan kemanusiaan itu adalah salah satu alat untuk mencapai kepentingan strategis dari negara yang memberikan suatu bantuan. Dalam kasus ini peneliti menganggap kepentingan strategis yang didapat dari Amerika Serikat melalui bantuan kemanusiaan yang dijalankan yaitu seperti halnya dengan terjaganya kepentingan demokrasi di negara penerima bantuan, terciptanya lapangan kerja yang mendukung perdagangan bebas, dan memberi pelayanan dan edukasi mengenai permasalahan kekerasan gender yang merupakan *concern* Amerika Serikat, dan juga mendukung pendidikan bagi anak-anak maupun wanita agar terciptanya generasi yang mandiri.

Selain itu dengan hadirnya Tiongkok di Sudan Selatan terkait Senjata mengancam investasi kepentingan yang dijalankan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak pernah senang dengan kehadiran senjata di Sudan Selatan. hal ini dikarenakan peredaran senjata bertentangan dengan misi Amerika Serikat dalam penyebaran kepentingan strategis yang telah dijelaskan peneliti pada sub bab terkait kepentingan strategis Amerika Serikat. selain itu Amerika Serikat juga berkomitmen dalam membatasi jumlah senjata di dunia, komitmen ini

ditunjukkan dengan diratifikasinya *Arm Trade Treaty* pada 25 September 2013 oleh Amerika Serikat.

Keseimbangan Kekuasaan

Tiongkok merupakan salah satu negara yang mempunyai peran yang penting didalam memberikan bantuan kepada Sudan Selatan dalam usahanya untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di negara Sudan Selatan. Tiongkok juga merupakan aktor yang berperan penting didalam pertumbuhan ekonomi di Sudan Selatan dalam hal ini terkait sektor petroleum atau minyak bumi. Sudan Selatan sebelum menjadi negara yang merdeka mereka menjadi bagian dari negara Sudan yang mana Tiongkok memegang pengaruh yang besar didalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di kedua belah negara melalui perusahaan minyak bumi yang bernama *China National Petroleum Corporation (CNPC)*.

Kemudian pada tahun 1997 Pemerintah Sudan mendirikan perusahaan Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC), yang mana GNPOC ini mulai meluncurkan program ekspolarasi dan pengembangan yang ekstensif dengan rencana untuk memulai ekspornya pada tahun 1999 (CNPC, 2009). Perusahaan GNPOC ini membagi sahamnya yang terdiri dari CNPC sebesar 40%, Petronas 30%, ONGC Videsh 25% dan Sudapet yang dimiliki Sudan sebesar 5% (FortuneofAfrica, 2016). GNPOC menggarap sumber daya minyak yang ada di blok 1, 2 dan 4. Blok 1 yang sekarang merupakan bagian dari wilayah Sudan Selatan. Blok 2 dan 4 yang berada di wilayah Abyei, merupakan bagian dari persengketaan wilayah di antara Sudan dengan Sudan Selatan. kemudian konsorsium Petrodar juga menjalankan program eksplorasi dan pengembangan untuk melakukan ekspor. Konsorsium Petrodar pada blok 3 dan 7 membagi sahamnya yang terdiri dari masing masing investor yaitu CNPC yang memiliki 41%, Petronas 40%, Nilepet 8%, Sinopec yang juga merupakan perusahaan Tiongkok yang memiliki jumlah investasi 6%, dan Tri-ocean Energy of Kuwait 5% (FortuneofAfrica, 2016).

Konsep keseimbangan kekuasaan menurut Claude, jika suatu negara menjadi kuat atau mengancam untuk menjadi sangat kuat, negara lain harus mengakui sebagai ancaman bagi keamanan mereka dan harus menanggapi dengan mengambil tindakan tandingan untuk meningkatkan kekuatannya (Sheehan, 1996). Apabila Amerika Serikat tidak hadir di Sudan Selatan maka Amerika Serikat akan kehilangan potensi sumber daya alam berupa minyak yang dimiliki oleh Sudan Selatan. dan juga Tiongkok yang merupakan rival dalam perekonomian akan mempunyai pengaruh kebijakan yang besar di Sudan Selatan. Meskipun Sudan Selatan bukan penyedia minyak bumi bagi Amerika Serikat, posisi Sudan Selatan harus menjadi perhatian bagi Amerika Serikat karena Sudan Selatan maupun Sudan penyedia minyak bumi bagi Tiongkok. Dan juga Tiongkok mempunyai peran yang besar sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi di Afrika dalam hal ini yaitu Sudan Selatan sebelum terjadinya konflik bersaudara di negaranya.

Tindakan yang dijalankan oleh Amerika Serikat di Sudan Selatan seperti halnya, Pada tahun 2012, Hillary Clinton dalam kunjungannya ke Afrika datang ke Sudan Selatan untuk membicarakan suatu hal. Sudan Selatan merupakan negara ke 2 yang dikunjungi Hillary Clinton dalam lawatannya ke Afrika. Hillary Clinton yang merupakan menteri luar negeri Amerika Serikat pada saat itu meminta untuk segera menyelesaikan perselisihan terkait sengketa wilayah di Abyei. Hillary Clinton mengatakan dengan terjadinya penyelesaian maka sumber daya alam terkait minyak di wilayah Abyei dapat mengalir lagi (BBC, 2012). Dalam *event / forum* yang dilakukan oleh pemerintah Sudan Selatan terkait program investasi dinegaranya pada tahun 2013, Salva Kiir mengundang negara negara lain untuk melakukan investasi di negaranya karena Salva Kiir melihat bahwa negaranya kaya akan sumber daya alamnya. Dan perlu menjadi catatan

khusus terkait forum investasi yang dilakukan Sudan Selatan, Donald Booth sebagai utusan Amerika Serikat menyatakan bahwa fokus prioritas bagi Amerika Serikat di Sudan Selatan ada dalam sektor agrikultur, kesehatan, pertambangan, petroleum, pariwisata dan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kebutuhan Amerika Serikat (AGOA, 2013).

Selain itu Tiongkok juga menjalankan kerjasama dalam bidang senjata dengan Sudan Selatan. NORINCO yang merupakan perusahaan milik Tiongkok telah berhasil melakukan pengiriman senjata pada tahun 2014. Senjata itu dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal kargo bernama Feng Huang Song menuju pelabuhan Mombasa yang berada di Kenya. Setelah tiba di Kenya kemudian dilanjutkan melalui jalur darat menuju destinasi akhir yaitu Sudan Selatan. Diperkirakan total dari harga senjata yang telah dikirim oleh pihak Tiongkok senilai USD20 juta yang pada nantinya akan dipergunakan untuk mengamankan wilayah Sudan Selatan. Kargo senjata yang dikirimkan NORINCO kepada Sudan Selatan terdiri dari 40 ribu amunisi anti-tank, 2300 penembak granat, 20 ribu anti-personel granat, 9500 senapan serbu tipe 56, dan disertakan dengan 24 juta peluru senapan (TheDiplomat, 2015).

Keberatan Amerika Serikat terkait senjata Tiongkok jika dilihat dari sudut pandang ekonomi. Amerika Serikat merupakan negara di urutan pertama dalam melakukan penjualan senjata di dunia, melihat Tiongkok mulai aktif dalam peredaran senjata dianggap sebagai ancaman. Amerika Serikat menganggap Tiongkok merupakan kompetitornya dalam hal perdagangan senjata. Dilihat dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh Tiongkok dengan Sudan Selatan terkait senjata pada tahun 2011 dan 2013. Dan pada tahun 2014 adanya pengiriman senjata yang dilakukan oleh Tiongkok melalui perusahaannya NORINCO ke Sudan Selatan. Amerika Serikat perlu hadir dalam rangka membendung pengaruh Tiongkok terkait senjata. Dengan tindakan Amerika Serikat yang mengeluarkan perintah *Executive Order – Blocking Property of Certain Persons With Respect to South Sudan* dalam rangka membendung peredaran senjata di Sudan Selatan. perintah ini terkait pelarangan segala jenis barang yang mengancam hak hidup warga negara Sudan Selatan. Tindakan Amerika Serikat kemudian diikuti oleh berbagai pihak hingga Tiongkok tidak lagi melakukan pengiriman senjata setelah tahun 2014.

KESIMPULAN

Melihat kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Amerika Serikat di Sudan Selatan. terdapat sebuah kesimpulan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis dalam menjalankan kebijakan luar negerinya di Sudan Selatan. Kepentingan strategis Amerika Serikat yang dapat peneliti amati yaitu diantaranya untuk mempromosikan demokrasi, melindungi hak-hak warga negara khususnya perempuan dan anak, mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga untuk memperbaiki kualitas karakter dari masyarakat Sudan Selatan. Dalam hal ini konsep kepentingan nasional merupakan hal yang ditekankan oleh Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Amerika Serikat berkeyakinan bahwa setiap anak dan perempuan mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk menyuarakan aspirasinya oleh karenanya hal ini yang dijalankan oleh Amerika Serikat di Sudan Selatan.

Kedua, Kehadiran Tiongkok di Sudan Selatan merupakan sebuah ancaman bagi Amerika Serikat karena Tiongkok merupakan salah satu kompetitor Amerika Serikat di dunia internasional. Kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat yaitu hadir di Sudan Selatan dalam rangka mengimbangi pengaruh Tiongkok di Sudan Selatan. Salah satu tindakan yang dijalankan oleh Amerika Serikat di Sudan Selatan yaitu ikut aktif dalam hal membicarakan permasalahan sumber daya alam yang dimiliki Sudan Selatan. dan selain itu Amerika Serikat juga ikut

berperan dalam meminimalisir perdagangan senjata di Sudan Selatan yang dijalankan oleh Tiongkok. Amerika Serikat menganggap sumber daya alam dan perdagangan senjata merupakan faktor yang penting sehingga Amerika Serikat hadir di Sudan Selatan.

Referensi

- AGOA, 2013. *South Sudan president kiir lures foreign investors despite institutional weaknesses*.
Available at: <https://agoa.info/news/article/5328-south-sudan-president-kiir-lures-foreign-investors-despite-institutional-weaknesses.html>
[Accessed 2018].
- Aljazeera, 2013. *South Sudan president fires cabinet*.
Available at: <http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/07/201372318388499663.html>
[Accessed 2017].
- Aljazeera, 2015. *South Sudan: 15,000 children recruited to fight*.
Available at: <http://www.aljazeera.com/news/2015/12/south-sudan-15000-children-recruited-fight-151215143752222.html>
- Amir, I. H., 2005. *Conflict and Politics of Identity in Sudan*. 1st ed. New York: Palgrave Macmillan US.
- BBC, 2011. *South Sudan profile - overview*.
Available at: <http://www.bbc.com/news/world-africa-14019208>
- BBC, 2012. *Hillary Clinton urges Sudan-South Sudan agreements*.
Available at: <https://www.bbc.com/news/world-africa-19107566>
[Accessed 2019].
- BBC, 2012. *South Sudan 'to complete shutdown' of oil production*.
Available at: <http://www.bbc.com/news/world-africa-16769935>
[Accessed 2017].
- BBC, 2015. *Malakal: The city that vanished in South Sudan*.
Available at: <http://www.bbc.com/news/world-africa-34571435>
[Accessed 2017].
- BBC, 2015. *South Sudan profile - Leaders*.
Available at: <http://www.bbc.com/news/world-africa-14019204>
- Braathen, E., 2000. *Ethnicity Kills? The politics of War, Peace and Ethnicity in SubSaharan Africa*. Great Britain: Macmillan Press LTD.
- CNPC, 2009. *CNPC in Sudan*.
Available at:
<https://www.cnpc.com.cn/en/eninsudan/201704/6d34f24713a748b8858a00dca50a3a1f/files/681168000496429187e14cec33e61a1e.pdf>
[Accessed 2018].
- FortuneofAfrica, 2016. *Oil and Gas Companies in South Sudan*.
Available at: <http://fortuneofafrica.com/southsudan/oil-and-gas-companies-in-south-sudan/>
[Accessed 2018].
- HRW, 2014. *South Sudan: Massacres, Unlawful Killings, Pillage*.
Available at: <https://www.hrw.org/news/2014/08/08/south-sudan-massacres-unlawful-killings-pillage>
[Accessed 2017].

HRW, 2015. *“We Can Die Too”*.
Available at: <https://www.hrw.org/node/284325>

Laswell, H., 1972. *Politics: Who gets what, when, how*. New York: The World Publication Comp.

Sheehan, M., 1996. *The Balance of Power*. New York: Routledge.

Spiegel, S. L., World Politics in A new Era. 1995. New Jersey: Harcourt Brace College Publishers.

TheDiplomat, 2015. *UN Report: China Sold \$20 Million in Arms and Ammunition to South Sudan*. [Online]
Available at: <https://thediplomat.com/2015/08/un-report-china-sold-20-million-in-arms-and-ammunition-to-south-sudan/>

UN, 2011. *UNMISS*.
Available at: <https://unmis.unmissions.org/abyei-road-map-agreement>
[Accessed 2017].

UNDP, 2012. *COMMUNITY CONSULTATION REPORT Eastern Equatoria State*, Juba: United Nations Development Programme.

UNDP, 2012. *Upper Nile State*, Juba: United Nations Development Programme.

UNICEF, 2014. *South Sudan Child Soldiers*.
Available at: https://www.unicef.org/media/media_73457.html
[Accessed March 2019].

USAID, 2011. *SOUTH SUDAN – COMPLEX EMERGENCY*.
Available at: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00J478.pdf

USAID, 2012. *SOUTH SUDAN – COMPLEX EMERGENCY*.
Available at: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00J4Q4.pdf

USAID, 2013. *SOUTH SUDAN – COMPLEX EMERGENCY*.
Available at:
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/south_sudan_ce_fs06_09-30-2013.pdf

USAID, 2014. *SOUTH SUDAN CRISIS FACT SHEET*.
Available at: <https://www.usaid.gov/crisis/south-sudan/fy14/fs50>

USAID, 2015. *SOUTH SUDAN – CRISIS*.
Available at:
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/south_sudan_crisis_fs12_09-30-2015.pdf

USDepartmentofState, 2019. *Discover Diplomacy*.
Available at: <https://www.state.gov/discoverdiplomacy/diplomacy101/issues/170609.htm>
[Accessed 2019].